

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, F. (2021). *Teori dan Konsep Administrasi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Hayat. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nawawi, Z. (2019). *Manajemen Pemerintahan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sadili Samsudin. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sihombing, E. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Sinarwati, N. K. (2021). *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Expert.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukristyanto, A., & Suyanto, B. (2021). *Pembangunan dan Birokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Sumihardjo, T. (2008). *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Anwar Press.
- Syafiie, I. K. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, H. A. W. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumber Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Sumber Lain

Adi Wardhana, Danar Hafidz, dkk. (2025). Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Mendukung Pembangunan Desa Pamboborang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (4), 285–294. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.62951/inovasisosial.v2i4.2522>

Anggara, Reksi dan Pribadi, Ulung. (2024). Community Participation in Village Deliberations: Examining the Dynamics of Influencing Factors. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 8 (1). Diakses 15 Januari 2026. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113>

Azis, Fatimah dan Irmawati. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 1 (2), 10–18. Diakses 21 Februari 2026. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/pakis/article/view/4003>

Aruan, Simon Makarios. (2021). *Implementasi Peraturan Desa dalam Pembangunan Desa (Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf d, Pasal 55 huruf a, dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*. Tesis, Universitas Pakuan. Diakses 16 Januari 2026. <https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2512&bid=14590>

- Cahyono, H. (2021). Peran Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Sosialisasi*, 8 (1), 1–15. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v8i1.18873>
- Desa Lestari. “BPD dan LPMD sebagai Ujung Tombak Masyarakat dalam Mengawal Pembangunan Desa”. <https://desalestari.com/2016/05/20/bpd-dan-lpmd-sebagai-ujung-tombak-masyarakat-dalam-mengawal-pembangunan-des/>. Diakses 22 Februari 2026.
- Desa Kagokan. “LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)”. <https://kagokan-sukoharjo.desa.id/lembaga?halaman=lpmd-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-des>. Diakses 23 Februari 2026.
- Hidayat, A. (2023). Kendala Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 11 (3), 200–215. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.38011/jhl.v11i3.3124>
- Ife, Jim. “Community Development: Community-Based Alternatives”. <https://academic.oup.com/cdj>. Diakses 15 Januari 2026.
- Ilman, Afthon. “Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa”. <https://padangjaya.desa.id/artikel/2022/6/17/tugas-dan-fungsi-lembaga-kemasyarakatan-des>. Diakses 23 Februari 2026.
- Khadikah, Nabila Nur dan Muljanto, Muhammad Agus. (2025). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Pendorong dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3 (2). Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.406>
- Nasution, S. H. (2019). Otonomi Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (2), 441–458. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1912>
- Rahayu, A. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (1), 39–52. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.22146/jsp.54321>
- Ridwan, M. (2023). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (1), 85–100. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.9876>

- Risfaisal, dkk. (2023). Sosialisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pembangunan Desa Berbasis Lokalitas Adat Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4 (3), 620–631. Diakses 21 Februari 2026. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i3.1698>
- Setiawan, Wahyu. “Pengertian LPMD Beserta Tugas Pokok dan Fungsi”. <https://tosari.kendalkab.go.id/kabardetail/KzVFcURyZ0V6N2Urb1E2aUF4K0N1QT09/pengertian-lpmd-beserta-tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses 16 Januari 2026.
- Santika, I. G. N. (2021). Model Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (2), 311–322. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34132>
- Samekto, F. X. Adji. (2020). Peran Hukum dalam Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Hukum Nasional*, 3 (1), 40–55. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.31258/jhn.v3i1.2145>
- Sari, M. (2022). Analisis Teori Peran dalam Kinerja Organisasi Publik. *Jurnal Manajemen dan Administrasi*, 6 (2), 95–110. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.32502/jma.v6i2.4521>
- Syafruddin, Akhmad dan Nahas, Junus Ekha Chornelis. (2023). Optimalisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Ajaobaki Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 1 (2). Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/2KtguO3rEDvG76N2G>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP. Diakses dari <https://www.undp.org>